



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H., M.Si.

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SOEKARWO.

Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

Selaku atasan langsung dari pihak pertama.

Selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 30 Januari 2014

PIHAK KEDUA
GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570507 198503 1 014

**PENETAPAN KINERJA ESELON II TAHUN 2014
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia ASN (pegawai Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	1) Prosentase Pengelola Kepegawaian di SKPD yang mampu menyusun formasi pegawai dengan benar dan tepat waktu.	100%	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur, kegiatan Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dalam pelaksanaan tugas dengan sub kegiatan: 1. Bimtek formasi dan bezeeting; 2. Ujian dinas; 3. Ujian Kompetensi; 4. Pengiriman diklat pim; 5. Ujian seleksi tugas belajar;	3.500.000.000,00
	2) Prosentase peserta yang lulus ujian penyesuaian	100%		
	3) Prosentase pejabat structural yang mengikuti diklat pim IV, III, dan II.	70%		
	4) Prosentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS.	10 %	Program pembinaan dan pengembangan Aparatur, kegiatan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai dan penghargaan, dengan sub kegiatan: 1. Proses penyelesaian disiplin pegawai; 2. Inspeksi mendadak dlm rangka penegakan disiplin pegawai; 3. Proses penyelesaian proses pelanggaran pegawai terkait pidana.	2.400.000.000,00
	5) Prosentase penurunan indikasi kasus pidana yang melibatkan PNS.	10 %		
	6) Prosentase CPNS sesuai dengan kebutuhan pegawai (formasi dan bezeeting pegawai).	60%	Program pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur dengan kegiatan seleksi penerimaan CPNS.	2.200.000.000,00

1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian	1) Nilai IKM	84	Program peningkatan kualitas pelayanan public kegiatan Pemantapan Koordinasi pembinaan pelayanan public di bidang kepegawaian dan monitoring dan evaluasi program.	2.000.000.000,00
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur.	1) Prosentase PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan pegawai sesuai hasil pemetaan pegawai.	4%	Program pengelolaan SDM Aparatur, kegiatan penataan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya dengan sub kegiatan: 1. Analisis dan proses mutasi pegawai. 2. Analisa proses penetapan pejabat structural; 3. Evaluasi tim Baperjakat; 4. Analisis proses pengalihfungsikan jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu; 5. Evaluasi SKPD yang melakukan penataan pegawai.	2.900.000.000,00
	2) Prosentase penetapan pejabat structural sesuai dengan kompetensinya.	90%		
	3) Prosentase pegawai yang dialihfungsikan dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu dalam rangka penataan pegawai.	6%		
	4) Prosentase SKPD yang melaksanakan penataan Jabatan Fungsional tertentu.	100%		
Terwujudnya pusat informasi kepegawaian se- Jawa Timur	1) Prosentase data PNS yang uptodate dan akurat. (per record)	75%	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi, kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) dengan sub kegiatan: 1. Digitalisasi data pegawai; 2. Koneksi jaringan WEB dg SKPD; 3. Penataan tatanaskah pegawai;	2.000.000.000,00
	2) Prosentase SKPD dan Kab/kota yang terkoneksi dengan jaringan database SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur	70%		
	3) Prosentase SKPD dan Kab/kota yang mengirim/mengentri peremajaan data baik secara fisik atau on line system (computer).	70%		

Jumlah seluruh anggaran murni tahun 2014 (Belanja Langsung)	:	20.057.664.000,00
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	:	3.050.994.000,00
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana	:	1.552.450.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	:	144.650.000,00
4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	:	159.620.000,00
5. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	:	180.000.000,00
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	2.000.000.000,00
7. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	:	8.100.000.000,00
8. Program Pengelolaan SDM Aparatur	:	2.900.000.000,00
9. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	:	2.000.000.000,00

PIHAK KEDUA
GUBERNUR JAWA TIMUR


Dr. H. SOEKARWO

Surabaya, 30 Januari 2014
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19570507 198503 1 014